



## Peran UMKM di Kota Depok dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Provinsi Jawa Barat

Ester Veronika<sup>1\*</sup>, Innaya Izti<sup>2</sup>, Chika Yunita<sup>3</sup>, Nabila Pebriyani<sup>4</sup>, Dzannuba Dirgantara<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Alamat: Jl. Margonda Rata No. 8, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16422

\*Korespondensi penulis: [63220716@bsi.ac.id](mailto:63220716@bsi.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to identify the strategic role of MSMEs in driving sustainable economic growth in Depok City and its impact on improving community welfare in West Java. Through qualitative and quantitative approaches, this study analyzes various factors that influence MSME performance. The results of the study are expected to provide effective policy recommendations to support the development of MSMEs in Depok City.*

**Keywords:** *UMKM, Depok City, West Java.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kota Depok serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mendukung pengembangan UMKM di Kota Depok.

**Kata kunci:** UMKM, Kota Depok, Jawa Barat.

### 1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Depok menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan UMKM di Kota Depok dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti peningkatan jumlah pelaku usaha, diversifikasi produk, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terhadap modal, pemasaran, dan teknologi. Keterbatasan dalam hal ini sering kali menghambat kemajuan dan keberlanjutan usaha mereka.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi semakin penting di tengah isu-isu lingkungan dan sosial yang semakin mendesak. UMKM, sebagai bagian dari sistem ekonomi, diharapkan dapat menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Melalui inovasi dan keterlibatan

komunitas, UMKM memiliki peluang untuk menciptakan produk dan jasa yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran UMKM di Kota Depok dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami kontribusi dan tantangan yang dihadapi UMKM, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pelaku usaha dalam merancang kebijakan yang lebih efektif

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM adalah usaha ekonomi produktif tanpa ada campur tangan dengan lembaga lain yang dilakukan oleh perseorangan atau pelaku usaha, dimana pelaku usaha ini bukan bagian dari anak perusahaan atau anak cabang yang sudah dimiliki, atau menjadi bagian langsung dari usaha kecil atau besar (Purwanti, 2012).

Menurut (Aliyah, 2022) melalui kewirausahaan, UMKM sangat berperan dalam mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan serta membangun kapribadian negara. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi potensi sebagai usaha dagang cukup besar dikalangan masyarakat yang akan membuat masyarakat berwirausaha semakin banyak, sehingga akan semakin baik ekonomi di suatu wilayah.

UMKM adalah jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset (Fauzan Muttaqien, 2022)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM adalah salah satu pelaku kunci dalam proses pembangunan nasional. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian negara dan penyerapan tenaga kerja (Muljanto, 2020)

Adanya UMKM akan menjadikan stabilisator bagi perekonomian Indonesia karena UMKM mampu hidup di tengah usaha besar dan dapat meningkatkan produktivitas dengan tenaga yang lebih produktif. Selain itu, UMKM juga dapat membantu usaha-usaha besar, seperti memasok bahan mentah, komponen, dan bahan yang dibutuhkan lainnya untuk diolah oleh usaha besar menjadi produk atau barang yang mempunyai nilai tinggi (Widjaja et al.,

2020). Untuk itu, Indonesia perlu memberi perhatian yang lebih besar terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebab dampaknya terhadap perekonomian negara sangat besar.

### **Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi, tetapi perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi (Arsyad, 2019).

Pembangunan ekonomi menjadi bagian dari seluruh usaha pembangunan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi juga merupakan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya melalui pendapatan serta pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dalam arti lain, pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan perkapita dalam periode yang panjang (Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, 2022).

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pendapatan. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas hidup.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana individu dan kelompok dalam suatu komunitas memiliki tingkat kehidupan yang baik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan atau kekayaan, tetapi juga melibatkan kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dari pembangunan yang dapat ditentukan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata (Putra, 2023).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Sukmasari, 2020).

Kesejahteraan masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan harus melibatkan pendekatan yang holistik, dengan memperhatikan berbagai dimensi dan faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan yang berkelanjutan dapat tercapai, memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

### **Pendekatan Deskriptif**

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain (Handayani, 2020).

Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Dr. Muhammad Ramdhan, 2021).

Penelitian deskriptif sering juga disebut dengan penelitian taksonomik, dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada, penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, penelitian deskriptif tidak mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menarik generasi yang menyebabkan suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial terjadi demikian (Hasan Syahrizal, 2023).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung (Saputra, 2021).

Penelitian ini berfokus pada pencatatan data aktual tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, baik yang berkaitan dengan karakteristik subjek, fenomena, atau proses yang sedang berlangsung. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat, melainkan lebih pada upaya menggambarkan apa yang terjadi saat ini.

Secara umum, penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai suatu fenomena tertentu melalui pengumpulan data yang relevan.

Pendekatan ini banyak diterapkan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan bisnis, di mana pemahaman mengenai situasi yang ada sangat penting sebelum membuat keputusan lebih lanjut.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003). Empat ciri utama dalam penelitian studi pustaka yaitu: Pertama, bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka pada umumnya merupakan sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan/atau mengembangkan beberapa bahan pustaka seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen(baik yang berbentuk cetak maupun elektronik).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1, dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagai- mana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Beberapa kriteria yang digunakan dalam Undang-undang tersebut untuk mendefinisikan UMKM yang tercantum di dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut : a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50 juta dan tidak termasuk di dalamnya tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan per tahun paling besar Rp 300 juta. b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50

juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan per tahun lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000,00, dan. c. Usaha menengah adalah suatu perusahaan yang nilai kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500 juta dan paling banyak mencapai Rp 100 milyar dan hasil penjualannya per tahun mencapai di atas Rp 2,5 milyar dan paling tinggi mencapai Rp 50 milyar. Untuk menentukan di samping nilai moneter yang digunakan sebagai kriteria, beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini jumlah pekerja yang dipakai sebagai ukuran untuk mengklasifikasikan suatu usaha masuk sebagai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro merupakan suatu unit usaha yang jumlah pekerja tetapnya hingga 4 orang, untuk usaha kecil pekerja tetapnya antara 5 sampai 19 orang, dan usaha menengah jumlah pekerja tetapnya dari 20 hingga 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Pentingnya keberadaan usaha mikro kecil dan menengah dalam kancah perekonomian nasional tidak hanya karena jumlahnya yang banyak, tetapi juga dalam hal banyaknya kemampuan menyerap tenaga kerja.

Selain itu usaha berskala mikro, kecil dan menengah juga mampu melakukan kegiatan ekspor barang-barang tertentu yang mampu menghasilkan jumlah devisa yang cukup besar seperti yang tertera dalam Pasal 43 ayat (1) PMK 96/2023, dimana ekspor barang kiriman dengan berat kotor kurang dari 30 kg dan diekspor oleh eksportir yang bukan badan usaha akan dilaporkan melalui penyampaian consignment note (CN) oleh penyelenggara pos pada pejabat bea dan cukai di kantor pabean.

**Tabel 1. Data UMKM Kota Depok Tahun 2018-2023**

DATA UMKM KOTA DEPOK TAHUN 2018-2023						
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM	19.892	14.616	14.716	5.609	7.239	10.167

Sumber: Portal Statistik Kota Depok.

Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada tahun 2021-2022 yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah terjadinya Pandemi COVID-19. Pandemi ini memberikan beberapa dampak seperti penurunan penjualan, gangguan rantai pasok, kendala akses keuangan, serta perubahan perilaku konsumen.

## **Karakteristik UMKM**

Karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik di Negara transisi lainnya. Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Secara umum, dalam menjalankan usahanya UMKM memiliki karakteristik bisnis sebagai berikut: 1. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri dan pemiliknya. 2. Terbatas sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank dari bank yang ingin melayani usaha kecil dan menengah, 3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relative rendah. Penyebabnya antara lain karena kurang kemampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan, dan lain sebagainya. 4. Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. 5. Umumnya sektor UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

Oleh karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM seperti yang diuraikan diatas tersebut, tidak heran kenapa pemerintah sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program seperti program pendanaan, pengembangan kapasitas, pemasaran, kemudahan berusaha, kolaborasi dengan sektor swasta dengan tujuan mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Memahami karakteristik UMKM di Kota Depok sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan program pengembangan UMKM yang tepat sasaran. UMKM di Kota Depok memiliki karakteristik yang unik dan beragam. Beberapa karakteristik yang sering ditemukan antara lain: 1. Dominasi Sektor Kuliner: UMKM di Kota Depok didominasi oleh sektor kuliner. Mulai dari makanan ringan hingga restoran, kuliner menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku UMKM. 2. Skala Usaha Mikro: Sebagian besar UMKM di Depok merupakan usaha mikro dengan jumlah karyawan yang sedikit dan modal yang terbatas. 3. Lokasi Strategis: Banyak UMKM yang berlokasi di area strategis seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, atau sepanjang jalan raya untuk memudahkan akses konsumen. 4. Keterbatasan Akses Pembiayaan: Akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu kendala utama bagi UMKM di Depok. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. 5. Pemanfaatan Teknologi yang Masih Terbatas: Penggunaan teknologi digital dalam menjalankan bisnis masih terbatas pada sebagian UMKM. 6. Kreativitas dan Inovasi: Meskipun menghadapi berbagai tantangan, UMKM di Depok juga menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk dan layanannya.

## **Kontribusi Terhadap PDB**

PDB adalah singkatan dari Produk Domestik Bruto. PDB adalah ukuran total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. UMKM adalah tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sangat signifikan karena beberapa alasan: 1. Penyerapan Tenaga Kerja: UMKM seringkali menjadi pemberi kerja terbesar, menyerap sebagian besar tenaga kerja, terutama di daerah-daerah. Dengan mempekerjakan banyak orang, UMKM meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mendorong konsumsi yang berkontribusi pada PDB. 2. Inovasi: UMKM seringkali lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar. UMKM seringkali menjadi pionir dalam inovasi produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 3. Akses ke Pasar Lokal: UMKM lebih dekat dengan konsumen lokal, memahami kebutuhan mereka dengan baik. Hal ini memungkinkan UMKM untuk menyediakan produk dan jasa yang lebih relevan, sehingga meningkatkan permintaan domestik. 4. Diversifikasi Ekonomi: UMKM menciptakan keberagaman dalam perekonomian. Mereka beroperasi di berbagai sektor, dari pertanian hingga teknologi, sehingga mengurangi ketergantungan pada beberapa sektor tertentu dan membuat ekonomi lebih stabil. 5. Kontribusi Terhadap Ekspor: Meskipun sering diasosiasikan dengan pasar domestik, banyak UMKM juga berkontribusi pada ekspor, terutama produk-produk kerajinan tangan atau produk makanan khas, Ekspor meningkatkan devisa negara dan berkontribusi pada PDB.

Maka, UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas, inovasi, dan kedekatan mereka dengan pasar membuat mereka menjadi mesin pertumbuhan yang penting.

Menurut Wali Kota Depok, Mohammad Idris kepada [depok.go.id](http://depok.go.id) usai menghadiri acara Gebyar UMKM di Lapangan Merdeka, UMKM Kota Depok memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi penyumbang terbesar Produk Regional Bruto (PDRB) yaitu berkontribusi sebesar 65% terhadap PDRB.

## **Penyerapan Tenaga Kerja**

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah jumlah lapangan kerja yang tercipta oleh UMKM pada Kota Depok:



**Tabel 2. Jumlah Lapangan Kerja yang Tercipta Oleh UMKM Pada Kota Depok**

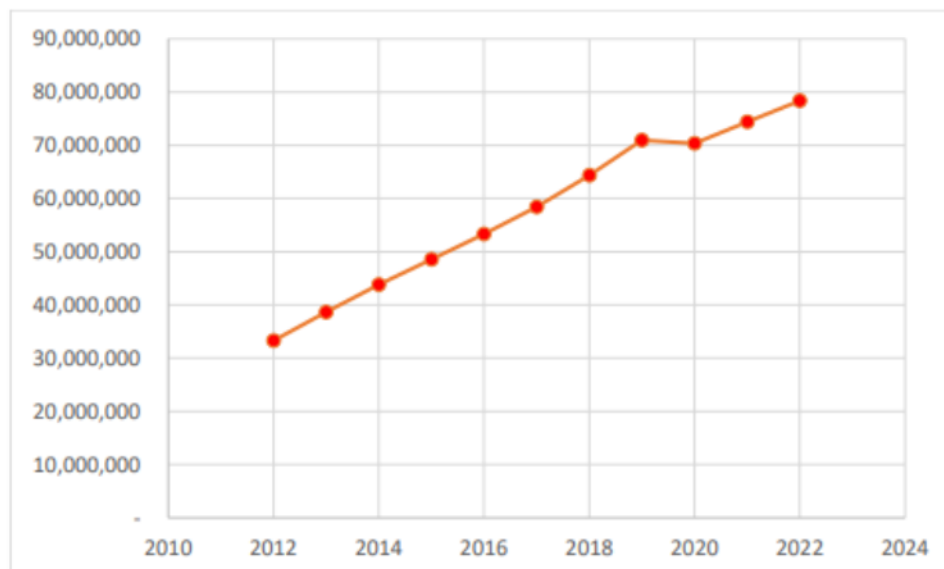
JUMLAH LAPANGAN KERJA YANG TERCIPTA OLEH UMKM PADA KOTA DEPOK					
UMKM PADA KOTA DEPOK					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tenaga Kerja	19.892	14.516	34.767	27.763	27.158

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Lapangan kerja dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa UMKM berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja yang beragam.

### Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah penduduk Kota Depok pada periode sepuluh tahun terakhir (2011- 2021) berkisar antara 1.813.613 jiwa (tahun 2011, depokkota.bps.go.id) sampai dengan 2.085.940 jiwa (tahun 2021, Depok dalam Angka 2022). Berdasarkan data yang dipublikasi BPS Kota Depok (Kota Depok dalam Angka 2022), tahun 2021 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 10.415 penduduk per km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi, dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Cipayung yaitu sebesar 15.371 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Sawangan sebesar 7.060 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi**

Sumber: PDRB 2020 sd 2022.

Tabel 3 menyajikan PDRB Kota Depok pada periode 2012-2022 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah). Pada periode tersebut, selain pada tahun 2020, nilai PDRB Kota Depok selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan nilai minimum sebesar Rp. 33.283.562 pada tahun 2012, dan nilai maksimum sebesar Rp. 78.371.876, berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2022 (Gambar 3). Peningkatan PDRB pada periode 2012-2022 berfluktuasi pada kisaran 8,69% (tahun 2016-2017) sampai dengan 13,83% (tahun 2012-2013). Meskipun pada tahun 2020 diperkirakan terjadi penurunan PDRB dari tahun 2019 sebesar 0,83%, namun secara umum pada periode 2012-2021, PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sekitar 8,4 %. Secara rata-rata, PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran pada periode 2012-2022 adalah sebesar Rp. 57.676.869.

### **Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM**

Menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu Pondasi Perekonomian Nasional, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kontribusi UMKM mencapai 99% dari seluruh unit usaha, kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan mampu menyerap tenaga kerja 96,9%.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis, bahkan menjadi *booster* pemulihan ekonomi pada saat krisis, termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Namun demikian, umumnya UMKM di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan, beberapa tantangan tersebut antara lain akses keuangan, pemasaran/promosi, infrastruktur dan teknologi, regulasi dan birokrasi serta keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan peran dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan penguatan sektor UMKM sebagai salah satu gerbong penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia adalah : 1. Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan

pasar mereka. Pembangunan infrastruktur konektivitas digital, seperti *Satelit Palapa Ring* dan *Base Transceiver Station*, sehingga pelaku usaha yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital. 2. Program Pembiayaan, sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya. Pemerintah memberikan dukungan melalui program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro. 3. Digitalisasi UMKM, Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024. 4. Sinergi dan Koordinasi, peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

### Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik untuk mengatasinya. UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi di Indonesia, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. UMKM merupakan salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan dukungan yang tepat, UMKM dapat tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 4. Persentase Penduduk yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan**

PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL, MENURUT JENIS KELAMIN (Persen)						
Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laki - Laki	9,59%	9,18%	9,59%	9,92%	9,29%	9,23%
Perempuan	10,06%	9,63%	9,96%	10,37%	9,65%	9,49%

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Dapat dilihat melalui tabel, persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2023. UMKM mampu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan mengurangi angka pengangguran. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun, untuk meningkatkan peran UMKM

tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM, seperti akses permodalan, teknologi, dan daya saing. UMKM memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

### Rata-Rata Pendapatan Penduduk

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi; penyedia lapangan kerja; pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru; dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran. Salah satu cara mengetahui peran UMKM dalam perekonomian adalah melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dalam satu tahun tertentu. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2013 UMKM mampu menyumbangkan Rp. 5.440 triliun (atas dasar harga berlaku terhadap PDB Nasional).

Melihat kiprah UMKM yang sangat penting dalam perekonomian, maka pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut adalah rata-rata pendapatan penduduk pada provinsi Jawa Barat:

**Tabel 5. Rata-Rata Pendapatan Penduduk**

Rata-Rata Pendapatan Penduduk				
Provinsi	Feb-24			
	Kelompok Umur			Jumlah
	15-24	25-54	55+	
Jawa Barat	1.450,50	2.278,50	1.867,70	2.117,20

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Dapat disimpulkan UMKM memiliki peran yang strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan perekonomian serta mengatasi berbagai masalah-masalah perekonomian khususnya kemiskinan dan pengangguran.

## **Klasifikasi UMKM**

Skala UMKM menurut peraturan di tahun 2008 atau sebelum perubahan adalah sebagai berikut: 1. Usaha Mikro adalah skala terkecil dari sebuah usaha menurut UU No 20 Tahun 2008. Pada skala usaha ini, pengusaha hanya memiliki modal paling banyak sebesar Rp 50 juta. Sedangkan total penjualan dalam satu tahun maksimal sebesar Rp 300 juta. 2. Usaha kecil dengan skala yang lebih besar memiliki modal mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta. Sedangkan jumlah penjualannya adalah dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. 3. Usaha menengah, pengusaha akan memiliki modal mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar. Sedangkan total jumlah penjualan dalam setahun adalah mulai dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung perekonomian Indonesia. Mereka bukan hanya sekadar entitas bisnis kecil; UMKM mencerminkan kreativitas, kerja keras, dan ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara di mana UMKM memberdayakan masyarakat: 1. Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM menjadi sumber utama lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan. Dengan menciptakan pekerjaan, UMKM membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Dengan beroperasi di tingkat lokal, UMKM mendukung ekonomi setempat. Mereka menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh komunitas, sehingga mengurangi ketergantungan pada produk luar. 3. Inovasi dan Kreativitas: UMKM sering kali lebih fleksibel dan inovatif dibandingkan perusahaan besar. Mereka mampu menghasilkan produk yang unik dan sesuai dengan kebutuhan lokal, mendorong kreativitas masyarakat. 4. Pemberdayaan Perempuan: Banyak UMKM dimiliki dan dioperasikan oleh perempuan, memberikan mereka kesempatan untuk mandiri secara finansial dan berkontribusi pada ekonomi keluarga dan masyarakat. 5. Pengembangan Keterampilan: UMKM sering kali menjadi tempat pelatihan bagi angkatan kerja baru. Melalui pelatihan dan pengalaman kerja, individu dapat mengembangkan keterampilan yang berguna untuk karier mereka di masa depan. 6. Sosialisasi dan Kerjasama Komunitas: UMKM sering kali berperan dalam menguatkan jaringan sosial dalam masyarakat. Kegiatan usaha mereka dapat menciptakan hubungan antarwarga dan meningkatkan solidaritas komunitas. 7. Keberlanjutan Lingkungan: Banyak UMKM yang mengadopsi praktik berkelanjutan dalam operasional mereka, seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan, yang tidak hanya membantu lingkungan tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan. 8. Akses terhadap Pasar:

UMKM dapat membantu anggota masyarakat untuk mendapatkan akses ke pasar, baik sebagai produsen maupun konsumen. Ini membantu meningkatkan daya beli dan memperluas jangkauan produk lokal. Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Peran UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung perekonomian Indonesia. Mereka bukan hanya sekadar entitas bisnis kecil; UMKM mencerminkan kreativitas, kerja keras, dan ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa cara di mana UMKM memberdayakan masyarakat: 1. Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM menjadi sumber utama lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan. Dengan menciptakan pekerjaan, UMKM membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Dengan beroperasi di tingkat lokal, UMKM mendukung ekonomi setempat. Mereka menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh komunitas, sehingga mengurangi ketergantungan pada produk luar. 3. Inovasi dan Kreativitas: UMKM sering kali lebih fleksibel dan inovatif dibandingkan perusahaan besar. Mereka mampu menghasilkan produk yang unik dan sesuai dengan kebutuhan lokal, mendorong kreativitas masyarakat. 4. Pemberdayaan Perempuan: Banyak UMKM dimiliki dan dioperasikan oleh perempuan, memberikan mereka kesempatan untuk mandiri secara finansial dan berkontribusi pada ekonomi keluarga dan masyarakat. 5. Pengembangan Keterampilan: UMKM sering kali menjadi tempat pelatihan bagi angkatan kerja baru. Melalui pelatihan dan pengalaman kerja, individu dapat mengembangkan keterampilan yang berguna untuk karier mereka di masa depan. 6. Sosialisasi dan Kerjasama Komunitas: UMKM sering kali berperan dalam menguatkan jaringan sosial dalam masyarakat. Kegiatan usaha mereka dapat menciptakan hubungan antarwarga dan meningkatkan solidaritas komunitas. 7. Keberlanjutan Lingkungan: Banyak UMKM yang mengadopsi praktik berkelanjutan dalam operasional mereka, seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan, yang tidak hanya membantu lingkungan tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan. 8. Akses terhadap Pasar: UMKM dapat membantu anggota masyarakat untuk mendapatkan akses ke pasar, baik sebagai produsen maupun konsumen. Ini membantu meningkatkan daya beli dan memperluas jangkauan produk

lokal. Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Peran UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung perekonomian Indonesia. UMKM bukan hanya sekedar usaha kecil, tetapi merupakan motor penggerak ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, UMKM sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah peran UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat: 1. Penciptaan Lapangan Kerja: UMKM menjadi sumber utama lapangan kerja, terutama di daerah. Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga. 2. Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Aktivitas UMKM berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Mereka mendorong perputaran uang dan menciptakan peluang bisnis baru. 3. Inovasi dan Kreativitas: UMKM seringkali menjadi wadah bagi inovasi dan kreativitas. Produk dan jasa unik yang mereka tawarkan dapat meningkatkan daya saing daerah. 4. Pelestarian Budaya: Banyak UMKM yang fokus pada produk-produk lokal, membantu melestarikan budaya dan warisan lokal. 5. Pemberdayaan Masyarakat: UMKM memberdayakan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda, untuk menjadi pelaku ekonomi mandiri. Berikut adalah cara UMKM meningkatkan kesejahteraan: 1. Meningkatkan Pendapatan: Dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, UMKM membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Mendorong Kemandirian; UMKM mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor formal. 3. Meratakan Pendapatan: UMKM berkontribusi pada pemerataan pendapatan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. 4. Meningkatkan Kualitas Hidup: Dengan pendapatan yang lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini telah mengungkap peran krusial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Depok dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. UMKM telah berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), dan mendorong inovasi. Namun, UMKM di Kota Depok juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses terbatas terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar yang kompetitif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan peran UMKM di Kota Depok dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat adalah perlunya peningkatan dukungan terhadap UMKM melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, kemudahan akses perizinan, dan fasilitasi pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif dan terjangkau bagi UMKM, serta memperluas akses pembiayaan. Pengembangan UMKM berbasis digital juga diperlukan dengan cara mendorong adopsi teknologi digital oleh UMKM melalui program pelatihan, insentif, dan penyediaan infrastruktur digital yang memadai, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Sumber Daya Manusia (SDA) juga sangat berpengaruh terhadap UMKM maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dengan cara Bekerjasama menyelenggarakan pelatihan dan program pengembangan kapasitas bagi pelaku UMKM, terutama dalam hal manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan untuk pemerintah dan swasta, serta mengintegrasikan materi kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan formal untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia usaha dalam lembaga pendidikan.



## DAFTAR REFERENSI

- Aliyah, A. H. (2022). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Arsyad, L. (2019). Ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05(01), 1–37.
- Ladjin, L., Sahamony, K., Maulina, S., Siregar, H., Hubbansyah, S., Solikin, S., Soeyatno, A., Asyari, S., & Sinaga, A. (2022). *www.penerbitwidina.com*.
- Muljanto, M. A. (2020). Pencatatan dan pembukuan via aplikasi akuntansi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 1–4.
- Muttaqien, F., & R. C. (2022). UMKM, pembukuan, sumber daya manusia, kewirausahaan. *Pembukuan sederhana bagi UMKM*, 1–10.
- Purwanti, E. (2019). Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga. *12(1)*, 66–74. <https://doi.org/10.1007/BF02532975>
- Putra, R. (2023). Determinan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 5(3), 229–245. <https://doi.org/10.31685/rbxbca04>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara (CMN).
- Saputra, N. (2021). *Penelitian tindakan kelas*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an. *Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 7–16.
- Syahrizal, H. M. J. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 18–23.
- Widjaja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukajie, B. (2020). Peranan kompetensi SDM UMKM dalam meningkatkan kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang Yani. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 465–476. <https://ejournal.bsi.ac.id>